

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Analisis Data dan Pembahasan**

Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pulau Morotai dalam penelitian ini adalah suatu proses analisis penilaian implementasi mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kinerja/kegiatan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dibidang keuangan dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2011 sampai dengan 2015. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang masing-masing data dianalisis dan disajikan dalam bentuk rumus digunakan untuk memaparkan karakteristik data hasil peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pengukuran analisis data untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam implementasi, penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah berupa analisis rasio yakni; rasio desentralisasi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah, serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah.<sup>83</sup> Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

---

<sup>83</sup> Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta; Salemba Empat.

(DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Adapun hasil analisis perhitungan rasio-rasio tingkat kinerja keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

### 5.1.1 Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2015

#### 5.1.1.1 Analisis Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi; 2009).<sup>84</sup>

Tabel 5.1 Hasil perhitungan rasio desentralisasi keuangan daerah dalam kriteria penilain kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015.

Tahun Anggaran	Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan
2011	0,310	Rendah sekali
2012	0,001	Rendah sekali
2013	87,33	Tinggi
2014	86,11	Tinggi
2015	87,48	Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi keuangan daerah pada tabel 5.1 kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan

<sup>84</sup> Mahmudi. (2009). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit. UPP STIM YKPN; Yogyakarta.

Asli Daerah (PAD) kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 dengan hasil analisis rasio desentralisasi keuangan daerah sebesar 0,310%, dan 0,001% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali.<sup>85</sup> Hal ini kemungkinan karena minimnya realisasi atas pos pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jatuhnya nilai rasio desentralisasi pada tahun 2012 nilainya sebesar 0,001% dikarenakan pada tahun tersebut ada program pemerintah yaitu program sail morotai dan morotai ditunjuk sebagai pelaksana program sail morotai ini, pemerintah daerah mendapatkan aliran dana transfer yang sangat tinggi. Tingginya dana transfer ini menyebabkan turunnya nilai rasio desentralisasi pada tahun 2012. Jika tidak ada dana transfer, besarnya rasio; sebesar 0,001% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah nilai ini juga menunjukkan nilai rasio yang rendah sekali.

Pada tahun 2013, 2014 dan 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan hasil analisis rasio desentralisasi keuangan daerah sebesar 87,33%, 86,11%, dan 87,48% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi.<sup>86</sup> Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sudah mampu

---

<sup>85</sup> Analisis rasio desentralisasi keuangan daerah dalam perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah pada tahun 2011 dan 2012 kemampuan kinerja keuangan daerah menjelaskan rendah sekali, (kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai).

<sup>86</sup> Rendahnya kemampuan keuangan daerah pada tahun 2011 dan 2012 disebabkan karena minimnya pendapatan realisasi PAD pada pos pendapatan; pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (*LRA 2011-2015*).

mengoptimalkan pengelolaan kinerja pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara baik sehingga kinerja yang dilihat dari nilai kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki katagori rasio yang tinggi diatas rata-rata 75% tingkat desentralisasi keuangan daerahnya.<sup>87</sup>

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden menjelaskan bahwa;

“Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara desentralisasi dilihat dari Pendapatan Asli Daerah PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2011 sampai dengan 2015 alhamdulillah selalu ada peningkatan setiap tahunnya (Wawancara 24 November 2016)”.<sup>88</sup>

Selain itu pernyataan responden lain menjelaskan ;

“Sesuai peraturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi keseluruhan pemerintah khususnya Kabupaten Pulau Morotai tiap tahun selalu dinyatakan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam hal ini Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara desentralisasi selalu ada peningkatan pendapatan daerah (Wawancara 1 Desember 2016)”.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis perhitungan rasio derajat desentralisasi keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 kriteria kemampuan keuangan menunjukkan kinerja yang baik yang ditandai

---

<sup>87</sup> Analisis rasio desentralisasi keuangan daerah dalam perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah pada tahun 2013, 2014 dan 2015 kemampuan kinerja keuangan daerah menjelaskan tinggi, (kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai).

<sup>88</sup> Pengelolaan APBD secara desentralisasi Pendapatan Asli Daerah PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2011 sampai dengan 2015 alhamdulillah selalu ada peningkatan setiap tahunnya, (Wawancara 24 November 2016). *Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah*.

<sup>89</sup> Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara desentralisasi selalu ada peningkatan pendapatan daerah, (Wawancara 1 Desember 2016). *Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah*.

dengan tingginya nilai rasio berada pada interval diatas rata-rata 75% dengan demikian kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dengan memiliki katagori kinerja yang tinggi.

**a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rasio Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai**

Secara umum masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian pendapatan daerah serta pelaksana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 sampai dengan 2015. Dari hasil analisis rasio desentralisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah menggambarkan kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tingkat desentralisasi derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah pada tahun 2011 dan 2012 kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah sekali. Faktor apakah yang menyebabkan minimnya angka rasio desentralisasi dapat dilihat dari wawancara berikut;

“Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai pada awal tahun 2011 pelaksana pemerintahan kami menyadari belum tersedianya sistem informasi manajemen yang baik dan ketidakakuratan data dasar, data teknis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas serta penerapan sistim (*self assessment system*) belum maksimal terkontrol. Oleh karena itu sistim yang kami terapkan akan dimaksimalkan disertai kontrol sebagaimana mestinya serta memecahkan solusi terkait pengelolaan sektor pendapatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai (Wawancara 24 November 2016)”.<sup>90</sup>

Selain itu pernyataan responden lain menjelaskan bahwa;

---

<sup>90</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (Wawancara 24 November 2016). *Tingkat desentralisasi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai*.

“Sesuai rapat kordinasi dengan dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kami menyadari sistem yang kami terapkan belum berjalan secara maksimal kurangnya pengawasan dan lainnya. oleh karena itu terkait Pendapatan Asli Daerah tiap tahun harus ditangani dengan serius dalam meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentunya (Wawancara 1 Desember 2016)”<sup>91</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah;

- 1) Belum tersedianya sistem informasi manajemen dengan baik
- 2) Ketidakakuratan data dasar pajak dan retribusi
- 3) Belum maksim terkontrol penerapan sistim (*self assessment system*) dalam pemungutan retribusi, pajak, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 4) Ketidakakuratan data teknis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas
- 5) Kurangnya pengawasan dari DPRD dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait sistim yang diterapkan dalam meningkatkan PAD.

---

<sup>91</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (Wawancara 1 Desember 2016)., (Wawancara 1 Desember 2016). *Tingkat desentralisasi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.*

**b) Upaya Solusi yang Bisa Dilakukan untuk Meningkatkan Keberhasilan Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Rasio Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Kedepannya**

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka penulis mengusulkan solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan rendahnya kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yaitu:

- 1) Menyediakan sistem informasi manajemen dengan baik
- 2) Memperbaiki manajemen pengelolaan data dasar pajak dan retribusi
- 3) Meningkatkan kontrol penerapan sistim (*self assessment system*) dalam pemungutan retribusi, pajak, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 4) Meningkatkan pemantauan sistem manajemen data teknis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas
- 5) Meningkatkan pengawasan dari DPRD dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait sistim yang diterapkan dalam meningkatkan PAD

Upaya dalam meningkatkan keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai diatas dapat diarahkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Ditambah lagi usaha mengontrol sistem (*self assessment system*) serta menyediakan sistem informasi manajemen keuangannya, sistem informasi manajemen keuangannya yaitu susunan dari berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dari sebuah organisasi menjadi informasi keuangan yang berguna dan bermanfaat. Dengan demikian pelaksana program perencanaan kinerja dapat terrealisasi secara efisien dan maksimal.

### **5.1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.**

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Mahmudi; 2006).<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. UPP STIM YKPN; Yogyakarta.

Tabel 5.2 Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dalam kriteria penilai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015.

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Ketergantungan Keuangan Daerah (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>
<b>2011</b>	99,68	Tinggi
<b>2012</b>	99,99	Tinggi
<b>2013</b>	12,59	Rendah sekali
<b>2014</b>	13,88	Rendah sekali
<b>2015</b>	12,38	Rendah sekali

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah pada tabel 5.2 besarnya pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 dengan hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 99,68% dan 99,99% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi.<sup>93</sup> Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dilihat dari penerimaan transfer anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada pos-pos pendapatan transfer meliputi dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, dan dana transfer pemerintah provinsi.<sup>94</sup> Kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 realisasi pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 12,59%, 13,88%, dan

<sup>93</sup> Rasio ketergantungan keuangan daerah dalam besarnya pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 dan 2012 kemampuan kinerja keuangan daerah menjelaskan tinggi, (kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai).

<sup>94</sup> Tingginya rasio ketergantungan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2011 dan 2012 disebabkan karena tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah Provinsi Maluku Utara, pada pos-pos pendapatan transfer; dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya. (*Laporan Realisasi Anggaran 2011-2015*).

12,38% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah sekali.<sup>95</sup> Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada sektor pendapatan yang tinggi sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi Maluku Utara semakin rendah dengan demikian kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden menjelaskan bahwa;

“Anggaran pendapatan daerah rasio ketergantungan yang dilihat dari pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu lima tahun ini kami selaku pemerintah daerah tidak bisa pungkiri bahwa ketergantungan kami terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih ada pada penerimaan pendapatan transfernya, karena pemerintahan kami masih sangat baru, akan tetapi data yang kami kumpulkan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) alhamdulillah selalu ada peningkatan setiap tahunnya (Wawancara 24 November 2016)”<sup>96</sup>

Selain itu pernyataan responden menjelaskan, bahwa;

“Kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tiap tahun dinyatakan dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD, sesuai rapat kordinasi dengan dinas pendapatan daerah alhamdulillah tiap tahun selalu ada peningkatan pada sektor pendapatan (Wawancara 1 Desember 2016)”<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Analisis rasio ketergantungan keuangan daerah dalam besarnya pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah pada tahun 2013, 2014 dan 2015 kemampuan kinerja keuangan daerah menjelaskan rendah sekali, (kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai).

<sup>96</sup> Ketergantungan masih ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) alhamdulillah selalu ada peningkatan setiap tahunnya, (Wawancara 24 November 2016). *Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah*.

<sup>97</sup> Kinerja pemerintah Kab, Pulau Morotai tiap tahun dinyatakan dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD, sesuai data pendapatan daerah alhamdulillah tiap tahun selalu ada peningkatan pada sektor pendapatan, (Wawancara 1 Desember 2016). *Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah*.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 dalam kriteria ketergantungan kemampuan keuangan menggambarkan rendah sekali berada pada nilai interval rata-rata dibawah 25%. Hal ini berarti bahwa dari tahun ke tahun kategori kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai semakin baik dalam pengelolaan potensi daerah dengan pendapatan daerah semakin efisien sehingga tingkat ketergantungan menunjukan rendah sekali.

**a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rasio Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai**

Secara umum masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian pendapatan daerah serta pelaksana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 sampai dengan 2015. Dari hasil analisis rasio ketergantungan kinerja pengelolaan keuangan daerah menggambarkan kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi Maluku Utara masih ada terlihat dari hasil analisis perhitungan dengan nilai interval kemampuan keuangan daerah pada tahun 2011 dan 2012 menggambarkan sangat tinggi, ini terjadi karena total pendapatan transfer pada tahun tersebut relatif meningkat. Hal serupa diungkapkan oleh responden menjelaskan bahwa;

“Kami tidak bisa pungkiri mengenai ketergantungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap pemerintah pusat dan/atau Provinsi Maluku Utara, karena Kabupaten Pulau Morotai masih termasuk salah satu kabupaten yang baru dimekarkan, oleh karena itu butuh waktu yang cukup untuk membiayai pemerintahan sendiri. Selain dari itu belum tersedianya sistem informasi manajemen PAD yang baik, terkait potensi dan sumber retribusi, jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak terhutang, realisasi dari bulan ke bulan serta informasi pengendalian kinerja lainnya yang dapat mengoptimalkan penerimaan daerah secara akurat. Namun kami berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengali potensi-potensi yang belum tersentuh untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pulau Morotai (Wawancara 24 November 2016)”<sup>98</sup>.

Begitu juga pernyataan oleh responden lain menjelaskan, bahwa:

“Ketergantungan kami selaku pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap pemerintah pusat dan/atau Provinsi Maluku Utara masih sangat tinggi bila dilihat dari anggaran transfer khususnya pos-pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun tiap tahun kami berusaha mengali sumber daya alam yang ada dan meningkatkan potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap ke arah yang lebih baik (Wawancara 1 Desember 2016)”<sup>99</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah;

---

<sup>98</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (Wawancara 24 November 2016). *Tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.*

<sup>99</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (Wawancara 1 Desember 2016)., (Wawancara 1 Desember 2016). *Tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.*

- 1) Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi atas ketergantungan anggaran pendapatan transfer yang tinggi
- 2) Belum tersedianya sistem informasi manajemen PAD yang baik, terkait potensi dan sumber retribusi, jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak terhutang, realisasi dari bulan ke bulan serta informasi kinerja lainnya.
- 3) Tidak adanya kontrol atas kinerja yang dapat mengoptimalkan penerimaan daerah secara akurat
- 4) Kurangnya pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**b) Upaya Solusi yang Bisa Dilakukan untuk Meningkatkan Keberhasilan Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Kedepannya**

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka penulis mengusulkan solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan rendahnya kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD dalam mengali dan menetapkan pencapaian target realisasi anggaran pendapatan daerah terutama pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dari pos penerimaan pendapatan; pajak daerah dan retribusi daerah maupun pada transfer provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah, agar keseimbangan likuiditas keuangan daerah terkordinir dengan baik yang berdampak pada pelaksana program realisasi yang maksimal dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi atas ketergantungan menurun

- 2) Menyediakan sistem informasi manajemen PAD yang baik, terkait potensi dan sumber retribusi, jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak terhutang, realisasi dari bulan ke bulan serta informasi kinerja lainnya.
- 3) Meningkatkan kontrol atas kinerja yang dapat mengoptimalkan penerimaan daerah secara akurat
- 4) Meningkatkan pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal

Upaya dalam meningkatkan keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai diatas dapat diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat dan provinsi).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba perusahaan daerah air minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Mardiasmo; 2002).

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

### **5.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah

daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya (Mahmudi; 2006).<sup>100</sup>

Tabel 5.3 Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dalam kriteria penilai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015.

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Kemandirian Keuangan Daerah (%)</b>	<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Pola Hubungan</b>
<b>2011</b>	0,311	Rendah	Konsultatif
<b>2012</b>	0,001	Rendah sekali	Instruktif
<b>2013</b>	693,3	Tinggi	Delegatif
<b>2014</b>	620,4	Tinggi	Delegatif
<b>2015</b>	706,6	Tinggi	Delegatif

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel 5.3 besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer pusat, transfer Provinsi Maluku Utara dan pinjaman daerah kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,311%, dan kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai rendah dengan pola hubungan bersifat konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.<sup>101</sup> Tahun 2012 hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,001%, kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah

<sup>100</sup> Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. UPP STIM YKPN; Yogyakarta.

<sup>101</sup> Rasio kemandirian keuangan daerah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer pusat, transfer Provinsi Maluku Utara. Dan pinjaman daerah pada tahun 2011 kinerja dalam kriteria kemampuan keuangan menunjukkan rendah dengan pola hubungan bersifat konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

menunjukkan nilai rendah sekali dengan pola hubungan bersifat instruktif artinya peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Hal ini menjelaskan pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber daya alam secara optimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya efektif dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun rendahnya nilai pada tahun 2012 ini sesungguhnya bukan karena tingkat ketergantungan yang semakin tinggi tetapi pada tahun ini ada program pelaksana sail morotai sehingga bantuan dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat dan/atau provinsi yang tinggi menyebabkan tampak adanya tingkat ketergantungan yang semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2013, 2014 dan 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 693,3%, 620,4% dan 706,6% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi dengan pola hubungan bersifat delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2012 dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan menunjukkan rendah sekali dengan pola hubungan bersifat instruktif artinya peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Ini menunjukkan tingkat kemandirian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai semakin baik dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dengan tingkat efisiensi yang tinggi serta mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan target program kinerja daerah.<sup>103</sup> Menurut (Halim; 2001), Secara teoritis pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu;<sup>104</sup>

- a. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

---

<sup>103</sup> Pada tahun 2013, 2014 dan 2015 kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai semakin baik baik dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah serta merealisasikan anggaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah Provinsi Maluku Utara dialokasikan sesuai dengan target program kinerja daerah.

<sup>104</sup> Halim, Abdul. (2001). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta; UPP STIM YKPN.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden menjelaskan bahwa;

“Penggunaan anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2011-2015 kami selaku pemerintah daerah berusaha semampu kami sekiranya daerah Kabupaten Pulau Morotai mampu mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam, pariwisata dan sektor lainnya. Walaupun saat ini belum sepenuhnya untuk menyatakan mandiri namun tiap tahun daerah ini semakin baik dalam pendapatan. Kamipun berharap kinerja dari pemerintah tiap tahun mengalami perbaikan kearah yang diharapkan (Wawancara 24 November 2016)”<sup>105</sup>.

Selain itu pernyataan responden lain menjelaskan, bahwa;  
 “Untuk kinerja instansi keseluruhan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tiap tahun selalu ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah terkait pengguna anggaran, sesuai data alhamdulillah tiap tahun selalu ada perbaikan kinerja. Pendapatan Asli Daerah sejauh ini kami selaku pemerintah daerah berusaha ke arah yang lebih baik agar sepenuhnya mampu mandiri dari beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Maluku Utara. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga kami selaku pemerintah belum sepenuhnya menyatakan mandiri karena ketergantungan daerah masih ada dari transfer penerimaan anggaran pemerintah pusat dan/atau pemerintah Provinsi Maluku Utara (Wawancara 1 Desember 2016)”<sup>106</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah diatas, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam kriteria kemandirian kemampuan keuangan menggambarkan tinggi berada pada

---

<sup>105</sup> Belum sepenuhnya untuk menyatakan mandiri namun tiap tahun daerah ini semakin baik dalam pendapatan, (Wawancara 24 November 2016). *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*.

<sup>106</sup> Pemerintah belum sepenuhnya menyatakan mandiri karena ketergantungan daerah masih ada dari transfer penerimaan anggaran pemerintah pusat dan/atau pemerintah Provinsi Maluku Utara, (Wawancara 1 Desember 2016). *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*.

nilai interval rata-rata diatas 100% dengan pola hubungan bersifat delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai**

Secara umum masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian pendapatan daerah serta pelaksana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 sampai dengan 2015. Dari hasil analisis rasio kemandirian kinerja pengelolaan keuangan daerah menggambarkan kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi Maluku Utara dan pinjaman. Daerah masih sangat bergantung terlihat dari hasil analisis perhitungan dalam interval rasio kemampuan keuangan daerah pada tahun 2011 menggambarkan rendah dengan pola hubungan bersifat konsultatif dan pada tahun 2012 kemampuan keuangan daerah menggambarkan rendah sekali dengan pola hubungan bersifat instruktif artinya peranan Pemerintahan Pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), ini terjadi karena total pendapatan transfer pada tahun tersebut relatif tinggi. Hal serupa dijelaskan oleh responden yakni;

“Terkait kemandirian keuangan daerah khususnya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau

Morotai dalam kurun waktu lima tahun dari 2011 sampai dengan 2015 kami berusaha mengalokasikan anggaran transfer sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada berupa pariwisata, perikanan dan lainnya. Walaupun saat ini daerah belum sepenuhnya mandiri namun tiap tahun kami melakukan perbaikan kinerja serta berusaha sesuai dengan target program kerja ke arah yang lebih baik (Wawancara 24 November 2016)”<sup>107</sup>.

Begitu juga pernyataan responden lain menjelaskan bahwa;

“Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang kami terima selalu naik tiap tahun karena kebutuhan daerah bertambah. Namun kami selaku pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tiap tahun selalu melakukan evaluasi dengan berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan meningkatkan sektor pendapatan secara bertahap ke arah yang lebih mandiri agar mampu membiayai kebutuhan daerah sendiri (Wawancara 1 Desember 2016)”<sup>108</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah;

- 1) Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi atas ketergantungan anggaran pendapatan transfer yang tinggi
- 2) Kurangnya pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)

---

<sup>107</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (Wawancara 24 November 2016). *Tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.*

<sup>108</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (Wawancara 1 Desember 2016)., (Wawancara 1 Desember 2016). *Tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.*

- 3) Kurangnya koordinasi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam pengelolaan anggaran transfer secara efisien dalam meningkatkan realisasikan sesuai target program pembangunan daerah.

**b) Upaya Solusi yang Bisa Dilakukan untuk Meningkatkan Keberhasilan Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Kedepannya**

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka penulis mengusulkan solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan rendahnya kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yaitu:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan atas penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam merealisasikan anggaran
- 2) Memaksimalkan pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Tingkatkan koordinasi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam pengelolaan anggaran transfer secara efisien dalam meningkatkan realisasikan sesuai target program pembangunan daerah.

Upaya dalam meningkatkan keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai diatas dapat diarahkan pada usaha yang terus menerus dalam pemanfaatan berupa potensi-potensi daerah.

Potensi-potensi daerah adalah suatu bentuk sumber daya alam, kemampuan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemampuan untuk bisa dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih besar. Diantaranya pemberdayaan sumber daya alam, potensi-potensi pariwisata, dan perikanan secara berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat dan provinsi. Pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi; intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti dengan demikian upaya peningkatan pendapatan asli daerah semakin baik.

### **5.1.3 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan (Mahmudi; 2009).<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Mahmudi. (2009). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit. UPP STIM YKPN; Yogyakarta.

Tabel 5.4 Hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan asli daerah dalam kriteria penilain kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015.

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Efektivitas Keuangan Daerah (%)</b>	<b>Kemampuan Daerah</b>
<b>2011</b>	108,7	Sangat efektif
<b>2012</b>	121,2	Sangat efektif
<b>2013</b>	637,5	Sangat efektif
<b>2014</b>	219,7	Sangat efektif
<b>2015</b>	951,4	Sangat efektif

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan asli daerah pada tabel 5.4 besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan PAD kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 hasil analisis rasio efektifitas pendapatan asli daerah sebesar 108,7%, 121,2%, 637,5%, 219,7% dan 951,4% dalam kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai yang tinggi sangat efektif. Hal ini menjelaskan kinerja rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum menunjukkan kinerja yang baik yang ditandai dengan tingkat efektifitas keuangan daerah berada pada interval rata-rata diatas 100% artinya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai sangat baik.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan responden menjelaskan bahwa;

“Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

dalam penggunaan anggaran kurun waktu lima tahun terakhir 2011 sampai dengan 2015 kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai telah merealisasikan sesuai dengan program pemerintah yang telah disepakati bersama dan alhamdulillah selalu ada peningkatan PAD setiap tahunnya (Wawancara 24 November 2016).<sup>110</sup>

Selain itu pernyataan responden lain menjelaskan, bahwa ;

“Untuk laporan realisasi anggaran dalam hal ini Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait dengan efektivitas pendapatan tentunya tiap tahun selalu ada evaluasi perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik, dan alhamdulillah tiap instansi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai selalu dinyatakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dan merealisasikan anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan bersama (Wawancara 1 Desember 2016).<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan bahwa besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan PAD kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam lima tahun 2011 sampai dengan 2015 kemampuan kinerja keuangan menunjukkan sangat tinggi berada pada interval >100% dengan kriteria kemampuan keuangan menjelaskan daerah Kabupaten Pulau Morotai sangat baik dan efektif.

---

<sup>110</sup> Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai telah merealisasikan sesuai dengan program pemerintah yang telah disepakati bersama dan alhamdulillah selalu ada peningkatan PAD setiap tahunnya, (Wawancara 24 November 2016). *Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah*.

<sup>111</sup> Pemerintah Kab, Pulau Morotai selalu dinyatakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dan merealisasikan anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan bersama, (Wawancara 1 Desember 2016). *Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah PAD*.

**a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai**

Secara umum masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian pendapatan daerah serta pelaksana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 sampai dengan 2015. Hasil analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa pos-pos anggaran dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang tidak terrealisasi secara optimal dalam kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian kinerja dari program yang telah direncanakan. Sejalan dengan itu juga pernyataan responden menjelaskan bahwa;

“Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam pelaksana realisasi anggaran dalam kurun waktu lima tahun ini, kami menyadari ada beberapa pos-pos anggaran tidak direalisasikan secara optimal sehingga tidak tercapainya target yang telah direncanakan. Namun kami selaku pemerintah daerah akan berusaha tiap tahun melakukan evaluasi dalam kinerja agar dapat meningkatkan perbaikan, serta pemantauan terhadap realisasi anggaran dalam kinerja program daerah (Wawancara 24 November 2016)”.<sup>112</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh responden lain menjelaskan bahwa;

“Sesuai rapat evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan dinas pendapatan daerah maupun instansi yang lain, tiap tahun kami melakukan evaluasi terkait pencapaian program kinerja daerah, dan ada beberapa pos anggaran yang tidak direalisasikan secara optimal sehingga tidak tercapainya target yang telah di programkan.

---

<sup>112</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (Wawancara 24 November 2016). *Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.*

Hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan likuiditas keuangan daerah tentunya (Wawancara 1 Desember 2016)”.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai adalah;

- 1) Minimnya pengalokasi anggaran terhadap realisasi yang sesuai dengan target program anggaran transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dari pos-pos pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan transfer dari pendapatan bagi hasil pajak serta pada pos lain-lain pendapatan yang sah.
- 2) Kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam realisasi anggaran secara efisien.
- 3) Kurangnya sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta melakukan pengawasan bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun SKPD khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) aparat pengelola PAD terhadap sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

---

<sup>113</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, (Wawancara 1 Desember 2016)., (Wawancara 1 Desember 2016). *Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.*

**b). Upaya Solusi yang Bisa Dilakukan untuk Meningkatkan Keberhasilan Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Kedepannya**

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka penulis mengusulkan solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan rendahnya kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yaitu:

- 1) Meningkatkan pengalokasi anggaran terhadap realisasi yang sesuai dengan target program anggaran transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dari pos-pos pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan transfer dari pendapatan bagi hasil pajak serta pada pos lain-lain pendapatan yang sah, anggaran dalam realisasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam realisasi anggaran secara efisien.
- 2) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam realisasi anggaran secara efisien.
- 3) Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta melakukan pengawasan bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun SKPD khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) aparat pengelola PAD terhadap sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah dalam upaya meningkatkan keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai diatas akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah dalam pengalokasi anggaran terhadap realisasi, untuk itu kebijakan anggaran sangat penting dalam mengarahkan ke pencapaian realisasi anggaran.

Kebijakan anggaran adalah suatu tindakan bagaimana mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam organisasi publik. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat efektivitas daerah.

Tabel 5.5;  
 Ringkasan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan dan  
 Solusi yang Bisa Dilakukan untuk Meningkatkan Keberhasilan Kinerja Kedepannya  
 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai

No.	Rasio-Rasio Kinerja Keuangan	Faktor-faktor dan Solusi	
		Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2015	Solusi yang Bisa Dilakukan untuk Meningkatkan Keberhasilan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Kedepannya
1	<b>Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah</b>	6) Belum tersedianya sistem informasi manajemen dengan baik 7) Ketidakakuratan data dasar pajak dan retribusi 8) Belum maksim terkontrol penerapan sistim ( <i>self assessment system</i> ) dalam pemungutan retribusi, pajak, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 9) Ketidakakuratan data teknis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas 10) Kurangnya pengawasan dari DPRD dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait sistim yang diterapkan dalam meningkatkan PAD.	1. Menyediakan sistem informasi manajemen dengan baik 2. Memperbaiki manajemen pengelolaan data dasar pajak dan retribusi 3. Meningkatkan kontrol penerapan sistim ( <i>self assessment system</i> ) dalam pemungutan retribusi, pajak, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 4. Meningkatkan pemantauan sistem manajemen data teknis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas 5. Meningkatkan pengawasan dari DPRD dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait sistim yang diterapkan dalam meningkatkan PAD
2	<b>Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah</b>	5) Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi atas	1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD dalam mengali dan menetapkan pencapaian target realisasi anggaran pendapatan

		<p>ketergantungan anggaran pendapatan transfer yang tinggi</p> <p>6) Belum tersedianya sistem informasi manajemen PAD yang baik, terkait potensi dan sumber retribusi, jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak terhutang, realisasi dari bulan ke bulan serta informasi kinerja lainnya.</p> <p>7) Tidak adanya kontrol atas kinerja yang dapat mengoptimalkan penerimaan daerah secara akurat</p> <p>8) Kurangnya pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>	<p>daerah terutama pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos penerimaan pendapatan; pajak daerah dan retribusi daerah maupun pada transfer provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah, agar keseimbangan likuiditas keuangan daerah terkordinir dengan baik yang berdampak pada pelaksana program realisasi yang maksimal dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi atas ketergantungan menurun</p> <p>2. Menyediakan sistem informasi manajemen PAD yang baik, terkait potensi dan sumber retribusi, jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak terhutang, realisasi dari bulan ke bulan serta informasi kinerja lainnya.</p> <p>3. Meningkatkan kontrol atas kinerja yang dapat mengoptimalkan penerimaan daerah secara akurat</p> <p>4. Meningkatkan pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.</p>
3	<b>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</b>	<p>4) Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi atas ketergantungan anggaran pendapatan transfer yang tinggi</p> <p>5) Kurangnya pemanfaatan atau mengali</p>	<p>1. Meningkatkan pemanfaatan atas penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam merealisasikan anggaran</p> <p>2. Memaksimalkan pemanfaatan atau mengali sumber daya alam yang ada, potensi-potensi</p>

		<p>sumber daya alam yang ada, potensi-potensi daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>6) Kurangnya koordinasi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam pengelolaan anggaran transfer secara efisien dalam meningkatkan realisasikan sesuai target program pembangunan daerah.</p>	<p>daerah berupa pariwisata, perikanan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>3. Tingkatkan koordinasi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam pengelolaan anggaran transfer secara efisien dalam meningkatkan realisasikan sesuai target program pembangunan daerah.</p>
4	<i>Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	<p>4) Minimnya pengalokasi anggaran terhadap realisasi yang sesuai dengan target program anggaran transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dari pos-pos pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan transfer dari pendapatan bagi hasil pajak serta pada pos lain-lain pendapatan yang sah.</p> <p>5) Kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam realisasi anggaran secara efisien.</p> <p>6) Kurangnya sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta melakukan pengawasan bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun SKPD khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) aparat pengelola PAD terhadap sektor-sektor</p>	<p>1. Meningkatkan pengalokasi anggaran terhadap realisasi yang sesuai dengan target program anggaran transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dari pos-pos pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan transfer dari pendapatan bagi hasil pajak serta pada pos lain-lain pendapatan yang sah, anggaran dalam realisasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam realisasi anggaran secara efisien.</p> <p>2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam realisasi anggaran secara efisien.</p> <p>3. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian serta melakukan pengawasan bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun SKPD khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) aparat pengelola PAD terhadap sektor-sektor Pendapatan</p>

		Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.	Asli Daerah (PAD) secara maksimal.
--	--	---	------------------------------------